

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	-----
Media Online	Radar Solo

Wilayah: Kota Surakarta

## Disdik Kota Surakarta Endus Pungli Berkedok Sumbangan (1 dari 2)

<https://radarsolo.jawapos.com/pendidikan/29/08/2022/disdik-kota-surakarta-endus-pungli-berkedok-sumbangan/>

**SOLO** – Pasca pandemi banyak sekolah yang berlomba-lomba kembali menggelar berbagai kegiatan di luar rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS). Konsekuensinya butuh biaya lebih untuk operasional. Ini menjadi celah munculnya pungutan liar (pungli) dengan dalih sumbangan ataupun iuran untuk kegiatan sekolah.

Hal ini mulai diendus Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surakarta. Sejumlah pengawas sekolah melaporkan adanya indikasi pungli ini. Sekolah pun di-*warning* agar tidak menarik iuran yang memberatkan siswa.

“Paling banyak kasus yang terjadi di sekolah. Malah berasal dari paguyuban orang tua yang secara sepihak memutuskan untuk mengadakan iuran ataupun sumbangan dengan jumlah nominal yang ditentukan. Ini yang biasanya membuat salah kaprah,” ujarnya Sekretaris Disdik Kota Surakarta Abul Haris Alamsah kepada *Jawa Pos Radar Solo*, kemarin (28/8).

Haris mengatakan, sejatinya keberadaan paguyuban wali murid adalah upaya merekatkan para orang tua siswa untuk berpartisipasi dalam kemajuan pendidikan. Sayangnya, paguyuban di sejumlah sekolah beberapa tahun terakhir bermetamorfosis menjadi pintu pungutan. Bermula dari inisiatif sendiri atau yang paling banyak permintaan sekolah.

Mereka mulai mengadakan iuran untuk *study tour*, biaya perpisahan di tempat mahal dan iuran lainnya. Sedangkan pada umumnya para pengelola atau pengurus utama paguyuban biasanya para orang tua yang memiliki kemampuan finansial yang cukup.

“Akhirnya dibuat suatu grup antar orang tua siswa per angkatan. Kemudian disebarkan bahwa diperlukan biaya sumbangan sebesar sekian dengan batas waktu dan jumlah yang telah ditetapkan. Selanjutnya dikumpulkan ke salah seorang pengurus. Ini yang tidak dibenarkan,” ucapnya

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	-----
Media Online	Radar Solo

Wilayah: Kota Surakarta

## Disdik Kota Surakarta Endus Pungli Berkedok Sumbangan (2 dari 2)

<https://radarsolo.jawapos.com/pendidikan/29/08/2022/disdik-kota-surakarta-endus-pungli-berkedok-sumbangan/>

Faktanya ada sebagian besar orang tua dari kalangan kurang mampu, tapi mereka hanya bisa diam atau pasrah. Padahal hati mereka menolak, tidak ikhlas. Namun karena unsur psikologis dan beban mental yang tidak bisa diungkapkan akhirnya orang tua yang kurang mampu ini setuju walau sebenarnya sangat berat.

“Ini kebanyakan jika orang tua menolak akan mendapatkan perlakuan berbeda, *bully*, beban mental, dan lain sebagainya. Persoalan ini yang sering terjadi. Maka kami selalu ingatkan kepada kepala sekolah untuk meluruskan. Jangan sampai paguyuban orang tua jadi celah pungutan liar,” imbuhnya.

Haris mengungkapkan, pasca pandemi dan kembali digelarnya pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen banyak sekolah yang berlomba-lomba menggelar kegiatan di luar RKAS. Dengan tegas dinas kembali mengingatkan sekolah untuk tidak memberatkan siswa dengan beragam iuran untuk kegiatan sekolah. Sekolah dapat menggunakan dana BOS untuk membiayai semua kegiatan sekolah.

“Misalnya jika dana BOS hanya mampu meng-*cover* lima kegiatan dari 10 kegiatan yang direncanakan, maka yang dipotong kegiatannya saja. Jangan kemudian dipaksakan dengan cara menarik umbangan atau iuran yang dikoordinasikan oleh paguyuban orang tua,” tegasnya.

Diakui Haris, masih ada sekolah yang berkesan lalai dan abai. Sekolah seolah-olah main mata tanpa ada sistem deteksi dini. Sekolah harus tegas dalam membuat aturan mengikat serta sanksi tegas agar problem pungutan ilegal tidak terjadi berulang dan bisa diakhiri.

“Kami tegaskan jika ada orang tua merasa adanya indikasi pungli di sekolah maka segera laporkan. Kami tegaskan untuk sekolah negeri tidak ada pungutan uang apapun. Jika pun ada itu sifatnya sumbangan sukarela, jika tidak mampu tidak usah membayar tidak apa-apa,” tandanya. **(ian/bun/dam)**